



JAKK - UHO

JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN (JAKK-UHO)

Vol.5 /No.1 /Bulan April Tahun 2024
e-ISSN: 2797-6831

RESPON PESERTA MANDIRI TERKAIT KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN DAN KEBERLANJUTAN KEPESERTAAN DI KOTA KENDARI TAHUN 2023

Nur Fadillah Ramdhani^{1*}, Fifi Nirmala G², Rastika Dwiyantri Liaran³

¹²³Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo
nurfadillahramdhani@gmail.com¹, fifinirmala87@gmail.com², rastika.liaran@gmail.com³

INFO ARTIKEL

Kata kunci: Kenaikan iuran, BPJS Kesehatan, Respon, Kepatuhan, Keberlanjutan Kepesertaan

***Korespondensi:**

Nur Fadillah Ramdhani
Universitas Halu Oleo
Kampus Hijau Bumi Tridharma
Anduonohu, Kendari
Email:
Nurfadillahramdhani@gmail.com

Copyright: © 2016 Author et al. This is an open access article distributed under the terms of the [JAKK-UHO Attribution License](#), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan (JAKK-UHO)
Published by Universitas Halu Oleo

Laman:
<http://ojs.uho.ac.id/index.php/jakk-uh>

Kode Etik: -

Abstrak

Latar Belakang: Dalam menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, pada tanggal 1 Juli 2020 BPJS Kesehatan menaikkan iuran dan disahkan pada tanggal 1 Agustus 2021. Kenaikan iuran ini berlaku untuk peserta non PBI, dan dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan ternyata masih menuai pro dan kontra di Kota Kendari. Data yang diperoleh dari BPJS Kesehatan Kota Kendari menunjukkan jumlah peserta PBU/mandiri yang menunggak di Kota Kendari pada tahun 2019 yaitu sebanyak 31.846 jiwa, tahun 2020 sebanyak 37.105, tahun 2021 sebanyak 82.626 jiwa, dan pada tahun 2022 sebanyak 91.538 jiwa. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa peserta PBU/mandiri yang menunggak pembayaran iuran di Kota Kendari semakin meningkat tiap tahunnya.

Tujuan: untuk mengetahui respon dari peserta BPJS Kesehatan mandiri terkait kenaikan iuran dan keberlanjutan kepesertaan di Kota Kendari Tahun 2023.

Metode: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Jumlah sampel yaitu sebanyak 409 responden yang ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan penyebaran kuesioner online (*google form*) melalui media sosial.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan karakteristik peserta sebagian dari mereka berprofesi sebagai wirausaha dengan rata-rata penghasilan dibawah UMK (Tahun 2023 Rp. 2.993.730) dan jumlah tanggungan mereka yang terdaftar sebagian besar memiliki 4 orang anggota keluarga. Selain itu, responden sebagian besar terdaftar di kelas rawatan III dan cenderung tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Adapun kenaikan iuran memperoleh respon negatif sebesar 53,8%, tidak patuh sebesar 57,7%, dan tidak melanjutkan kepesertaan sebesar 50,1% di Kota Kendari Tahun 2023.

Kesimpulan: Kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih mendapati respon negatif bagi peserta mandiri/PBU di Kota Kendari Tahun 2023. Sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tentang BPJS Kesehatan, terlebih lagi pada masyarakat kalangan bawah masih banyak yang belum mengetahui apa saja manfaat menjadi peserta. Selain itu, dengan adanya kenaikan iuran diharapkan pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan agar menjadi lebih baik dari sebelum kenaikan iuran.

Abstract

Background: In maintaining the quality and continuity of the health insurance program, on July 1 2020 BPJS Health increased the contributions and was ratified on August 1 2021. This increase in contributions applies to non-PBI participants, and with the increase in BPJS Health contributions it turns out that they are still reaping pros and cons in the city. Kendari. Data obtained from BPJS Health in Kendari City shows the number of PBP/indeed participants who are in arrears in Kendari City in 2019 is 31,846 people, in 2020 there are 37,105, in 2021 there are 82,626 people, and in 2022 there are 91,538 people. Based on these data, it can be said that PBP/independent participants who are in arrears of payment of contributions in Kendari City are increasing every year.

Objectives: to find out the response from independent BPJS Health participants regarding the increase in contributions and the continuation of membership in Kendari City in 2023.

Methods: The type of research used in this research is descriptive quantitative. The number of samples is 409 respondents who were determined using the purposive sampling method by distributing online questionnaires (google form) via social media.

Results: The results showed the characteristics of the participants, some of them worked as entrepreneurs with an average income below the UMK (2023 Rp. 2,993,730) and the number of their registered dependents had mostly 4 family members. In addition, most of the respondents were enrolled in treatment class III and tended to have no history of any disease. The increase in contributions received a negative response of 53.8%, 57.7% did not comply, and did not continue participation by 50.1% in Kendari City in 2023.

Conclusion: The increase in BPJS Health contributions still gets a negative response for independent participants/PBP in Kendari City in 2023. It is better to carry out socialization directly to the public about BPJS Health, especially among the lower class people who still don't know what the benefits of being a participant are. In addition, with the increase in contributions, it is hoped that health services can be improved so that they are better than before the increase in contributions.

PENDAHULUAN

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional adalah suatu tata cara penyelenggara program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang tujuannya untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun (DJSN, 2021)

Dalam mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka Pemerintah Indonesia membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan terdapat dua jenis BPJS yang dibentuk yaitu BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

BPJS Kesehatan telah menjalankan programnya sejak tanggal 1 Januari 2014. Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta termasuk orang asing yang telah bekerja selama 6 bulan di Indonesia dengan mendaftar atau didaftarkan. Terdapat 2 kelompok peserta BPJS Kesehatan yaitu PBI (Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan dan bukan PBI jaminan kesehatan. Iuran JKN merupakan sejumlah uang

yang dibayarkan secara teratur setiap bulannya kepada BPJS Kesehatan baik dari peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program JKN (BPJS Kesehatan, 2018).

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Indonesia pada tahun 2021 jumlah cakupan JKN sebanyak 235.719.262 (87,0%) jiwa yang telah memiliki jaminan kesehatan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai target UHC terdapat 6 (enam) provinsi yang telah mencapai kepesertaan semesta/Universal Health Coverage (UHC), yaitu Provinsi DKI Jakarta, Papua, Papua Barat, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sulawesi Utara. Cakupan JKN di Indonesia yaitu Penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 140.411.958 (51,80%), Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 60.008.295 (22,14%), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 30.914.126 (11,40%), dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 4.384.883 (1,62%) (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 jumlah cakupan JKN di Provinsi Sulawesi Tenggara hampir mencapai target UHC yaitu sebanyak 2.469.046 (90,01%) jiwa yang telah menjadi peserta JKN. PBI sebanyak 1.729.431 (63,0%), PPU sebanyak 516.674 (18,8%), PBPU/Mandiri sebanyak 190.132 (6,9%), dan Bukan Pekerja sebanyak 32.809 (1,2%) (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 jumlah cakupan JKN di Kota Kendari masih jauh dari target UHC yaitu sebanyak 298.656 (74,34%) jiwa yang telah menjadi peserta JKN. PBI sebanyak 103.990 (25,89%), PPU sebanyak 127.386 (31,71%), PBPU/Mandiri sebanyak 58.753 (14,63%), dan Bukan Pekerja sebanyak 8.527 (2,12%) (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022).

Penetapan besaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pertama kali tertera dalam Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun 2013 dengan rincian iuran yaitu peserta kelas rawatan 1 sebesar Rp. 59.000, kelas rawatan 2 sebesar Rp. 42.500, dan kelas rawatan 3 sebesar Rp. 25.500. Tetapi, dengan banyaknya jumlah pengguna layanan mengakibatkan BPJS Kesehatan mengalami defisit dana (Aulia, 2021).

Dalam menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, pada tanggal 1 Juli 2020 BPJS Kesehatan menaikkan iuran dan disahkan pada tanggal 1 Agustus 2021. Kenaikan iuran ini tidak berlaku untuk masyarakat yang terdaftar sebagai peserta PBI melainkan peserta PBPU/Mandiri. Besarnya iuran ditentukan oleh kelas rawatan yang diambil, umumnya kelas 1 paling besar di ikuti oleh kelas 2 dan kelas 3. kelas 1 dari Rp. 80.000 menjadi Rp. 150.000 per jiwa, kelas 2 naik dari Rp. 51.000 menjadi Rp. 100.000 per jiwa, dan kelas 3 naik dari Rp. 25.500 menjadi Rp. 42.000 per jiwa (Peraturan Presiden RI, 2020).

Iuran BPJS Kesehatan harus dibayar setidaknya sampai tanggal 10 setiap bulannya, jika mengalami keterlambatan selama 1 bulan maka kartu BPJS akan dinonaktifkan dan peserta akan terkena tunggakan. Segmen peserta yang paling banyak menunggak iuran yaitu peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Ada dua alasan yang memungkinkan kepatuhan segmen peserta PBPU/Mandiri rendah. Pertama yaitu karena memang ada yang tidak mampu membayar dan kedua, willingness atau keinginannya untuk membayarkan iuran rendah. Kebanyakan peserta PBPU/Mandiri yang mendaftar hanya karena pada saat sakit memerlukan layanan kesehatan yang mahal, tetapi setelah sembuh berhenti membayarkan iurannya (Chusnah, 2021).

Data yang diperoleh dari BPJS Kesehatan Kota Kendari menunjukkan jumlah peserta PBPU/mandiri di Kota Kendari pada tahun 2019 yaitu sebanyak 66.982 jiwa, tahun 2020 sebanyak 67.600 jiwa, tahun 2021 sebanyak 67.680 jiwa, dan pada tahun 2022 sebanyak 71.096 jiwa. Selain itu, diperoleh data dari BPJS Kesehatan Kota Kendari menunjukkan jumlah peserta PBPU/mandiri yang menunggak di Kota Kendari pada tahun 2019 yaitu sebanyak 31.846 jiwa, tahun 2020 sebanyak 37.105, tahun 2021 sebanyak 82.626 jiwa, dan pada tahun 2022 sebanyak 91.538 jiwa. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa peserta PBPU/mandiri yang menunggak pembayaran iuran di Kota Kendari semakin meningkat tiap tahunnya (BPJS Kesehatan Kota Kendari, 2023).

Hasil survei pendahuluan kepada peserta BPJS Kesehatan Mandiri pada bulan Oktober 2022 di Kota Kendari sehubungan dengan kenaikan iuran BPJS tersebut ternyata masih menuai pro dan kontra di tahun ini. Dari beberapa peserta menyatakan biaya BPJS Kesehatan saat ini masih mahal dan belum mengimbangi pelayanan kesehatannya yang belum maksimal. Pendapat

Ibu SS (37 tahun) dari kelas rawatan 1 mengatakan tidak setuju dengan penetapan iuran BPJS Kesehatan saat ini karena pelayanan kesehatan yang didapatkan belum ada peningkatan dari sebelum kenaikan iuran. Pendapat Bapak WD (49 tahun) dari kelas rawatan 2 mengatakan bahwa iuran BPJS Kesehatan mahal karena adanya kebutuhan yang lainnya tetapi ia berharap BPJS Kesehatan bisa menyesuaikan pelayanannya dengan baik. Pendapat Bapak MR (55 tahun) dari kelas rawatan 3 mengatakan iuran BPJS Kesehatan saat ini sangat membebani karena memiliki jumlah tanggungan keluarga yang banyak sehingga iurannya sudah menunggak 7 bulan dan tidak akan melanjutkan pembayarannya karena menurutnya iuran yang dibayarkan sia-sia karena tidak pernah digunakan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Data diperoleh menggunakan metode survei dimana peneliti menyebarkan kuesioner online (*google form*) melalui media sosial yaitu *facebook*, *instagram*, dan *whatsapp*. Penentuan jumlah sampel minimal menggunakan rumus *Slovin* yaitu 401 orang, dengan pengambilan data menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Kriteria yang mewakili sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Kendari, terdaftar sebagai peserta mandiri/PBPU BPJS Kesehatan, dan telah menjadi peserta lebih dari 24 bulan (2 tahun).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik responden

Tabel 1. Karakteristik responden

Karakteristik Responden	Kategori	Jumlah (n)	Persen (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	160	39,1
	Perempuan	249	60,9
Umur	< 30 tahun	204	50,5
	31-39 tahun	132	32,0
	> 40 tahun	73	17,5
Tingkat Pendidikan	SD	7	1,7
	SMP	36	8,8
	SMA	197	48,2
	Diploma Sarjana	36 133	8,8 32,5
Hubungan dengan Kepala Keluarga	Kepala Keluarga	146	35,7
	Istri	122	29,8
	Anak	141	34,5
Kecamatan	Kadia	101	24,7
	Kambu	102	24,9
	Mandongga	101	24,7
	Poasia	105	25,7
Total		409	100

Sumber : Data Primer, Februari 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 409 responden (100%) yang menyatakan jenis kelamin paling banyak yaitu perempuan sebanyak 249 responden (60,9%) dan paling sedikit laki-laki 160 responden (39,1%), umur yang paling banyak yaitu < 30 tahun sebanyak 204 responden (50,5%) dan paling sedikit > 40 tahun sebanyak 73 responden (17,5%), tingkat pendidikan paling banyak yaitu SMA sebanyak 197 responden (48,2%) dan paling sedikit yaitu SD sebanyak 7 responden (1,7%), hubungan dengan kepala keluarga paling banyak menunjukkan yaitu kepala keluarga sebanyak 146 responden (35,7%) dan paling sedikit yaitu istri sebanyak 122 responden (29,8%). Kecamatan paling banyak yaitu dari Poasia sebanyak 105 responden (25,7%) dan paling sedikit yaitu Kadia sebanyak 101 responden (24,7%) dan Mandonga sebanyak 101 responden (24,7%).

2. Distribusi karakteristik peserta mandiri

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Karakteristik Peserta Mandiri/PBPU di Kota Kendari Tahun 2023

Karakteristik Peserta	Kategori	Jumlah (n)	Persen (%)
Jenis Pekerjaan	Pedagang	139	34,0
	Petani	1	0,2
	Nelayan	3	0,7
	Wirausaha	148	36,2
	Lainnya (Advokat, apoteker, ojek online, buruh dan dokter)	118	28,9
Pendapatan Keluarga	< UMK (Tahun 2023 Rp. 2.993.730)	217	53,1
	> UMK (Tahun 2023 Rp. 2.993.730)	192	46,9
Jumlah Tanggungan	1 orang	13	3,2
	2 orang	41	10,0
	3 orang	109	26,7
	4 orang	137	33,5
	5 orang	66	16,1
	6 orang	34	8,3
	7 orang	6	1,5
	8 orang	3	0,7
Kelas Rawatan	Kelas I	51	12,5
	Kelas II	64	15,6
	Kelas III	294	71,9
Riwayat Penyakit	Kanker	1	0,2
	TBC	5	1,2
	Penyakit Jantung	9	2,2
	Diabetes	29	7,1

Karakteristik Peserta	Kategori	Jumlah (n)	Persen (%)
	Lainnya (maag, hipertensi, vertigo, asam urat, kolestrol, tipes, dan DBD)	87	21,3
	Tidak Ada	278	68,0
Total		409	100

Sumber : Data Primer, Februari 2023

Berdasarkan tabel diatas karakteristik peserta menunjukkan bahwa jenis pekerjaan paling banyak yaitu wirausaha sebanyak 148 responden (36,2%) dan paling sedikit yaitu petani sebanyak 1 responden (0,2%), pendapatan keluarga paling banyak yaitu < UMK (Tahun 2023 Rp. 2.993.730) sebanyak 217 responden (53,1%) dan paling sedikit yaitu > UMK (Tahun 2023 Rp. 2.993.730) sebanyak 192 responden (46,9%), jumlah tanggungan paling banyak yaitu 4 orang anggota keluarga sebanyak 137 responden (33,5%) dan paling sedikit yaitu 8 orang anggota keluarga sebanyak 3 responden (0,7%), kelas rawatan paling banyak yaitu kelas III sebanyak 294 responden (71,9%) dan paling sedikit yaitu kelas I sebanyak 51 responden (12,5%), riwayat penyakit paling banyak yaitu tidak ada riwayat penyakit sebanyak 278 responden (68,0%) dan paling sedikit yaitu kanker sebanyak 1 responden (0,2%).

Penelitian ini terdapat 409 responden yang memenuhi kriteria di Kota Kendari tahun 2023, Adapun beberapa kategori pada karakteristik peserta dalam penelitian tentunya ada kaitan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yaitu jenis pekerjaan, pendapatan keluarga, jumlah tanggungan, kelas rawatan, dan riwayat penyakit.

Pekerjaan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana dengan penelitian ini pekerjaan wirausaha merupakan pekerjaan paling banyak dilakukan oleh peserta mandiri BPJS Kesehatan Kota Kendari tahun 2023.

Pendapatan merupakan jumlah pemasukan yang didapatkan dari pekerjaan mereka, baik penjualan produk atau jasa pada konsumen. Dalam penelitian ini, peserta mandiri BPJS Kesehatan cenderung pendapatannya dibawah UMK Kota Kendari tahun 2023 yang berjumlah Rp. 2.993.730. Hasil ini sejalan dengan penelitian Mardika (2018) yang menunjukkan bahwa pendapatan dibawah Upah Minimum Regional (UMR) sebanyak 52 responden (54,7%) dan diatas Upah Minimum Regional (UMR) sebanyak 43 responden (45,3%). Jumlah pendapatan menjadi pendorong kesadaran masyarakat dalam mengikuti kebijakan asuransi kesehatan.

Jumlah tanggungan merupakan jumlah anggota keluarga yang masih dalam tanggungan kepala keluarga. Penelitian ini mendapati peserta mandiri BPJS Kesehatan dominan memiliki jumlah tanggungan lebih dari 4 anggota keluarga. Hasil ini sejalan dengan penelitian Murniasih dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga sedang (4-6 orang) sebanyak 105 responden (52,5%), anggota keluarga kecil (<3 orang) sebanyak 55 orang responden (27,5%), dan besar (>6 orang) sebanyak 40 responden (20,0%). Hal ini disebabkan dengan aturan yang mana jika mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan, wajib pula mendaftarkan anggota keluarga yang lain dalam satu kartu keluarga (KK) sebagai peserta BPJS Kesehatan. Aturan tersebut menyebabkan pertimbangan seseorang untuk menjadi peserta yang jika jumlah tanggungan anggota keluarga sedikit maka jumlah iuran semakin kecil, dan sebaliknya jika jumlah tanggungan anggota keluarga banyak maka jumlah iuran yang dibayarkan semakin besar.

Kelas rawatan merupakan tingkatan pada layanan kesehatan yang dapat dipilih setiap peserta sesuai kemampuan finansialnya. Kelas III mendominasi kelas rawatan pada kepesertaan mandiri BPJS Kesehatan di Kota Kendari tahun 2023. Hal ini sejalan dengan penelitian Hasibuan dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa kelas rawatan pada kelas III yaitu sebanyak responden (66,0%), kelas II sebanyak 37 responden (24,7%) dan kelas I sebanyak 14 responden (9,3%) dengan pembayaran mandiri.

Riwayat penyakit merupakan penyakit yang sedang atau pernah diderita. Pada penelitian ini peserta mandiri BPJS Kesehatan kebanyakan tidak memiliki riwayat penyakit. Hasil ini sejalan dengan penelitian Fajrani dkk. (2021) menunjukkan bahwa tidak ada riwayat penyakit sebanyak 82 responden (82,0%) dan ada riwayat penyakit sebanyak 18 responden (18,0%). Hal ini disebabkan peserta khawatir dan tidak yakin akan selalu sehat di masa mendatang. Selain itu, responden yang memiliki riwayat penyakit menggunakan asuransi kesehatan untuk meringankan biaya pelayanan kesehatan dan pengobatan.

Secara deskripsi, responden menentukan kelas rawatan yang diambil jika jenis pekerjaan dan pendapatannya memadai. Selain itu, jumlah tanggungan anggota keluarga dapat menjadi pertimbangan berat atau tidaknya iuran berdasarkan kelas rawatan yang diambil. Selanjutnya riwayat penyakit tentunya menjadi alasan responden menggunakan BPJS Kesehatan.

3. Distribusi frekuensi Respon Responden

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pernyataan Respon

Pernyataan	f (%)		Total
	Ya	Tidak	
Saya mengikuti perkembangan isu terkini mengenai BPJS Kesehatan	243 (59,4%)	166 (40,6%)	409 (100%)
Saya setuju dengan kenaikan iuran yang disahkan	162 (39,6%)	247 (60,4%)	409 (100%)
Kenaikan iuran memiliki dampak positif	148 (36,2%)	261 (63,8%)	409 (100%)
Kenaikan iuran membuat pelayanan JKN lebih baik dari sebelumnya	129 (31,5%)	280 (68,5%)	409 (100%)
Defisit negara terbantu dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan	266 (65,0%)	143 (35,0%)	409 (100%)
Kenaikan iuran tidak mengganggu ekonomi keluarga	170 (41,6%)	239 (58,4%)	409 (100%)
Saya mengetahui sanksi jika menunggak membayar iuran	284 (69,4%)	125 (30,6%)	409 (100%)
Saya menyetujui sanksi bagi penunggak iuran	270 (66,0%)	139 (34,0%)	409 (100%)

Sumber : Data Primer, Februari 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang mengikuti perkembangan isu terkini mengenai BPJS Kesehatan sebesar 59,4% dan tidak sebesar 40,6%, responden yang setuju dengan kenaikan iuran yang disahkan sebesar 39,6% dan tidak sebesar 60,4%, responden yang menganggap kenaikan iuran memiliki dampak positif sebesar 36,2% dan tidak sebesar 63,8%, responden yang menganggap kenaikan iuran membuat pelayanan JKN lebih baik dari sebelumnya sebesar 31,5% dan tidak sebesar 68,5%, responden yang menganggap defisit negara terbantu dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 65,0% dan tidak sebesar 35,0%, responden yang menganggap kenaikan iuran tidak mengganggu ekonomi keluarga sebesar 41,6% dan tidak sebesar 58,4%, responden yang mengetahui sanksi jika menunggak membayar iuran sebesar 69,4% dan tidak sebesar 30,6%, dan responden yang menyetujui sanksi bagi penunggak iuran sebesar 66,0% dan tidak sebesar 34,0%.

Isu perkembangan BPJS Kesehatan masih diperhatikan dari kebanyakan peserta mandiri/PBPU, seperti halnya kenaikan iuran yang telah ditetapkan terakhir kali. Masyarakat masih banyak yang tidak setuju akan kenaikan iuran tersebut, sebagian besar dari mereka tidak yakin dengan adanya kenaikan iuran akan memiliki dampak positif dan masyarakat meragukan jika pelayanan JKN akan membaik. Selain itu, masyarakat cenderung menganggap jika kenaikan iuran tersebut dapat membantu defisit negara tapi tak sedikit juga yang meragukannya, dan kebanyakan masyarakat menyatakan ekonomi keluarga dapat terganggu karena banyaknya kebutuhan diluar dari iuran BPJS Kesehatan. Peserta mandiri/PBPU di Kota kendari masih

banyak yang belum mengetahui sanksi dari menunggak iuran serta mereka tidak menyetujui dengan adanya sanksi bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan.

4. Distribusi variable respon peserta

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Respon Peserta

Variabel	Kategori	Jumlah (n)	Persent (%)
Respon Peserta	Respon Negatif	220	53,8
	Respon Positif	189	46,2
Kepatuhan Peserta	Tidak Patuh	236	57,7
	Patuh	173	42,3
Keberlanjutan Kepesertaan	Tidak Lanjut	205	50,1
	Lanjut	204	49,9
Total		409	100

Sumber : Data Primer, Februari 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa respon peserta dengan jumlah terbanyak yaitu respon negatif sebanyak 220 responden (53,8%) dan respon peserta dengan jumlah paling sedikit yaitu respon positif sebanyak 189 responden (46,2%). Kepatuhan peserta terdapat sebanyak 236 responden (57,7%) yang tidak patuh dan 173 responden (42,3%) yang patuh dalam membayarkan iuran BPJS Kesehatan tepat waktu. Keberlanjutan kepesertaan terdapat sebanyak 205 responden (50,1%) memilih untuk tidak melanjutkan kepesertaan BPJS Kesehatan dan 204 responden (49,9%) memilih untuk melanjutkan kepesertaannya.

Respon dalam penelitian ini berupa tanggapan dari responden terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan di Kota Kendari cenderung memberi respon negatif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hasibuan (2020) yang menunjukkan bahwa sebanyak 59,0% responden yang memberikan respon negatif atau penolakan terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Respon negatif disebabkan beberapa hal, seperti banyaknya jumlah tanggungan anggota keluarga yang didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan PBU/mandiri maka akan menambah besar iuran yang akan mereka bayarkan. Peserta merasa pendapatan mereka terbatas atau terbilang tidak tinggi, sehingga uang bulanan mereka sering kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan membuat mereka kesulitan dalam mengatur keuangan karena penghasilan pun tidak ada peningkatan (Chusnah, 2021).

Kepatuhan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PBU/mandiri merupakan komponen yang penting untuk mempermudah dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, bagi peserta BPJS Kesehatan mandiri wajib membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan (Fajrani et al., 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta cenderung tidak patuh dalam membayar iuran tepat waktu. Hal ini sejalan dengan penelitian Murniasih dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa tidak patuh sebanyak 109 responden (54,5%) dan patuh sebanyak 91 responden (45,5%). Ketidapatuhan membayar iuran peserta BPJS Kesehatan memiliki beberapa faktor yang berhubungan yaitu tingkat pengetahuan, pendapatan, persepsi terhadap pelayanan kesehatan dan resiko (Wulandari et al., 2020). Kurangnya pemahaman mengenai BPJS Kesehatan baik dari segi waktu pembayaran, berbagai metode pembayaran iuran yang tersedia dan konsekuensi yang didapatkan dari penunggakan pembayaran iuran dapat menjadi penyebab peserta tidak patuh. Peserta BPJS Kesehatan cenderung tidak patuh membayarkan iuran karena jumlah iuran yang akan dibayarkan tinggi yang menyebabkan pendapatan menjadi kendala dalam kepatuhan peserta BPJS Kesehatan dalam membayarkan iurannya tepat waktu, karena jika pendapatan mereka rendah maka dapat menurunkan kemampuan peserta dalam membayar iuran.

Keberlanjutan kepesertaan merupakan keputusan dari peserta BPJS Kesehatan mandiri terhadap lanjut atau tidak melanjutkan pembayaran iuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden cenderung tidak melanjutkan menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Chusnah (2021), yang menunjukkan bahwa ada sebanyak 92 responden (92,0%) peserta BPJS Kesehatan mandiri yang memilih untuk bertahan atau lanjut meskipun iuran BPJS Kesehatan mengalami kenaikan seperti sekarang. Hal ini disebabkan sebagian besar peserta mandiri memilih untuk menurunkan kelas rawatan ke kelas yang lebih rendah yaitu kelas III karena kenaikan iuran yang semakin tinggi dan jika menurunkan kelas rawatan maka biaya yang dibayarkan lebih rendah.

Teori demand dan supply yang menyatakan bahwa jika harga semakin tinggi maka permintaan terhadap pelayanan kesehatan akan mengalami penurunan. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang mana peserta BPJS Kesehatan mandiri tidak melanjutkan pembayaran iuran karena merasa keberatan dengan adanya kenaikan iuran. Peserta merasa keberatan dalam harga atau tarif yang ditetapkan karena banyak kebutuhan lain yang tidak seimbang dengan penghasilan mereka dan banyaknya jumlah anggota keluarga yang terdaftar, tentu saja dengan kendala tersebut mereka tidak mampu lagi menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri.

SIMPULAN

1. Karakteristik peserta mandiri sebagian dari mereka berprofesi sebagai wirausaha dengan rata-rata penghasilan dibawah UMK (Tahun 2023 Rp. 2.993.730) dan jumlah tanggungan mereka sebagian besar terdaftar lebih dari 4 orang anggota keluarga. Selain itu, peserta mandiri banyak yang berada di kelas rawatan III dan peserta sebagian besar tidak memiliki riwayat penyakit apapun.
2. Respon peserta mandiri di Kota Kendari terhadap kenaikan iuran memperoleh respon negatif yaitu sebanyak 220 responden (53,8%).
3. Kepatuhan peserta mandiri di Kota Kendari dalam membayarkan iuran BPJS Kesehatan memperoleh banyak peserta tidak patuh untuk membayarkan iuran tepat waktu yaitu sebanyak 236 responden (57,7%).
4. Keberlanjutan kepesertaan mandiri di Kota Kendari memperoleh sebanyak 205 responden (50,1%) memilih untuk tidak melanjutkan kepesertaan BPJS Kesehatan.

SARAN

1. Bagi BPJS Kesehatan, sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tentang BPJS Kesehatan, terlebih lagi pada masyarakat kalangan bawah masih banyak yang belum mengetahui apa saja manfaat menjadi peserta. Selain itu, dengan adanya kenaikan iuran diharapkan pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan agar menjadi lebih baik dari sebelum kenaikan iuran.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini belum sempurna karena adanya keterbatasan peneliti, diharapkan peneliti selanjutnya memperluas lagi cakupan variabel dari respon peserta BPJS Kesehatan terkait kenaikan iuran.

DAFTAR PUSTAKA

1. DJSN. Jaminan Kesehatan [Internet]. Dewan Jaminan Sosial Nasional. 2021 [cited 2022 Oct 28]. Available from: <https://www.djsn.go.id/sjsn/program-sjsn/jaminan-kesehatan>
2. BPJS Kesehatan. Panduan Layanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Vol. 3, Kemenkes 2018. 2018. 103–111 p.
3. Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021. Jakarta; 2022. 97–100 p.
4. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2021. 2022.
5. Aulia I. Persepsi dan Harapan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri dan BPJS Kesehatan di Kota Denpasar terhadap Kenaikan Iuran dan Keberlanjutan Kepesertaan. Bul

- Penelit Kesehat. 2021;49(2):123–34.
6. Peraturan Presiden RI. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2020. Jakarta; 2020.
 7. Chusnah RA. Respon Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Mandiri Dan Keberlanjutan Kepesertaan Di Kecamatan Medan Marelan Tahun 2020. Universitas Sumatera Utara; 2021.
 8. BPJS Kesehatan Kota Kendari. Data Sekunder Nomor : 167 /UN29.15.1 /PG/2023. Kendari; 2023.
 9. Mardika DT. Faktor Predisposisi, Pendukung, dan Pendorong Yang Mempengaruhi Perilaku Terhadap Kepatuhan Pembayaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Di Kabupaten Pacitan Tahun 2018 [Internet]. STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun; 2018. Available from: <http://repository.stikes-bhm.ac.id/58/1/9.pdf>
 10. Murniasih, Suparman R, Mamlukah, Febriani E. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Pada Peserta Mandiri Di Puskesmas Kertasemaya Kabupaten Indramayu Tahun 2022. *J Public Heal Inov.* 2022;03(01):41–51.
 11. Hasibuan R, Purnama TB, Susanti N. Respon Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dan Utilitas Puskesmas Oleh Peserta JKN di Medan. *J Kebijak Kesehat Indones* [Internet]. 2020;09(04):211–7. Available from: <https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/59237>
 12. Fajrani F, Latifah N, Hermansyah D, Firda N. Studi Ketidapatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Peserta Non PBI Bukan Penerima Upah di Kelurahan Cempaka Putih Tahun 2018. *Muhammadiyah Public Heal J.* 2021;1(2):129–38.
 13. Hasibuan R. Gambaran Respon Peserta JKN Mengenai Kenaikkan Premi Pada Dua Puskesmas Kota Medan Tahun 2019. *Sci Period Public Heal Coast Heal.* 2020;1(2):108–20.
 14. Wulandari A, Syah NA, Ernawati T. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Dalam Pembayaran Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Solok. *J Kesehat Andalas.* 2020;9(1):7–17.